



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
**UNIT KERJA** : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MUHAMMAD DIRAJAT
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 629702

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.516.800.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1500 m2/200 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
2. Tanah Seluas 1518 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 76.800.000
3. Tanah Seluas 30000 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 1.440.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 130.000.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 205.600.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 4.601.623

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 3.857.001.623

**III. HUTANG** Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 3.857.001.623

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.